

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA DIKELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Yosi Witasari**

**Pembimbing : Zaili Rusli**

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Pekanbaru City Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) is a poverty alleviation program carried out by the Pekanbaru City Government through a process approach to community empowerment with funding from Pekanbaru City APBD, Provincial APBD, APBN, BUMN, BUMD and Corporate Social Responsibility (CSR ) private companies and other non-binding assistance. The PMB-RW activity is a substitute program for the National Community Empowerment Program for Mandiri Rural (PNPM-MP) aimed at creating and increasing community participation in development, both individually and in groups to participate in solving various problems related to efforts to improve the quality of life, independence, and public welfare. The purpose of this study was to determine the community participation in PMB-RW in Tebing Tinggi Okura Village, Pekanbaru City Rumbai Pesisir District and what factors influence community participation. This study uses a type of descriptive research using a qualitative approach. The results of the study are based on the results of interviews and field observations. It is known that community participation in the implementation of the PMB-RW program in Tebing Tinggi Okura can be in the form of money or objects, ideas and thoughts and in the form of labor (mutual cooperation). Based on the results of the study, it is known that community participation in the implementation of the PMB-RW program in Tebing Tinggi Okura Village is still low, this is due to the low level of socioeconomic status of the people living in Tebing Tinggi Okura Village, low average education community, and because of people's busy life in earning a living to meet their daily needs. The factors that become a barrier to community participation in the implementation of the PMB-RW program in Tebing Tinggi Okura Village include internal factors which include (awareness / willingness, education, income / income). And external factors include (Leadership of the Village of Tebing Tinggi Okura and available facilities).*

***Keywords: Community Participation, Community-Based Community Empowerment Program and Tebing Tinggi Okura Village***

## 1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Adapun dampak dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien, kondisi lingkungan masyarakat seperti keberadaan sarana dan prasarana umum yang ada tidak terjaga dengan baik dan terbatasnya jangkauan pelayanan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana mereka mampu memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekitarnya demi meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat

kelurahan, solusi yang tepat adalah dikeluarkannya keputusan walikota tentang program PMB-RW. Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). PMBRW mulai di laksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2014, akan tetapi pada Kecamatan Rumbai Pesisir khususnya pada Kelurahan Tebing Tinggi Okura dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan baru adanya pengukuhan tenaga pendamping program PMB-RW pada Maret 2016 hal ini berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Kegiatan PMB-RW ini merupakan program yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang didasarkan/diilhami dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan *Program Usaha Ekonomi Kelurahan* Simpan Pinjam (UEK-SP) yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dimana kegiatan PMB-RW ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme penyelenggaraan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir, PMB-RW sendiri sudah mulai dilaksanakan secara bertahap oleh Pemko Pekanbaru melalui APBD murni dimana pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp150 milyar dan pada tahun 2016 dan 2017 dianggarkan dana 170 miliar dengan rincian 50 juta per RW dimana untuk Kelurahan Tebing Tinggi Okura terdapat 6 RW. Melalui pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini, nantinya masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan dana PMB-RW diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni

untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan bantuan sendiri, ditetapkan melalui rapat musyawarah RW. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat. Tak hanya untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, dana PMB-RW juga bisa digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan pembangunan fisik yang mendadak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di

Kelurahan Tebing Tinggi Okura  
Kota Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai masalah ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan administrasi negara.
  - 2) Sebagai masukan dan bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya
- b. Secara Praktis
  - 1) Sebagai bahan informasi bagi Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).
  - 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.
  - 3) Sebagai sumbangan data bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

#### 1.5 Konsep Teori

##### 1). Partisipasi

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. (Hidayat, 2011:34)

Sementara itu menurut Raharjo, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Partisipasi fisik  
Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- 2) Partisipasi non fisik.  
Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. (Raharjo, 2011:99)

##### 2). Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sujianto (2010:15) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Sedangkan menurut Usman (2011:40) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Menciptakansuasna atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar

### **3). Partisipasi Masyarakat**

Menurut Adisasmita, partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. (Adisasmita, 2011:87).

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal. Menurut Suroto, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- 1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 3) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. (Suroto, 2013:65)

### **4). Konsep Pembangunan**

Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan

koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 2013:98).

### **5). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. (Slamet, 2013:109)

Menurut Adisasmita, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diukur melalui:

- 1) Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam Musrenbang, misalnya berupa ide, gagasan, materi maupun sumbangan.

- 2) Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan dalam hal ini adalah apakah masyarakat diibatkan dalam proses penyusunan program-program pembangunan, seperti penyusunan program pembuatan jalan, jembatan, sumur bersih, rumah layak huni, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lain-lain.
- 3) Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya apakah program yang ditetapkan sesuai dengan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan.
- 4) Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. (Adisasmita, 2011:89)

## 1.5 Metode Penelitian

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

### 1.5.2. Informan Penelitian

Informan ini adalah tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh formal adalah Lurah Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir,

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sedangkan tokoh informal yaitu Ketua LKM Okura Bersatu, Ketua RW I dan RW II Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat tempatan yang ada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2007:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer dan skunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan dan wawancara mendalam.

### 1.5.4. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Adalah informasi yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Adalah data yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti yang diperoleh oleh

### 1.5.5. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana yang dibahas adalah permasalahan yang terjadi terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru di Kelurahan Tebing Tinggi Kota Pekanbaru. Data yang telah terkumpul dalam data mentah akan

dikelompokkan berdasarkan jenis, selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kalimat untuk kemudian dianalisa dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan

## **1.6. Hasil Penelitian**

### **1.6.1. Partisipasi Masyarakat Pada Program PMB-RW**

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta serta bantuan lain yang tidak mengikat. Kegiatan PMB-RW merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Menurut Adisasmita, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pada program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru dapat diukur melalui:

- 1) Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam penyusunan program PMB-RW pada Musrenbang, misalnya berupa ide, gagasan, materi maupun sumbangan.
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.
- 3) Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Kerjasama antara pemerintah, pengelola dana PMB-RW dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan program PMB-RW. (Adisasmita, 2011:89)

Untuk lebih mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura dalam program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan wawancara dengan para informan yang ada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang dianggap kompeten mengetahui tentang partisipasi masyarakat di kelurahan dalam pembangunan.

Adapun indikator-indikator yang akan diteliti dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Wujud Atau Dimensi Partisipasi**

Berdasarkan hasil beberapa wawancara penulis dengan informan penelitian maka terkait wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dapat diketahui melalui keterlibatan mereka dalam proses merencanakan program pembangunan seperti mengikuti Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musranbang) Kelurahan selain itu

masyarakat juga harus terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti keterlibatan tenaga mereka dalam pembangunan fasilitas umum seperti semenisasi jalan dan sanitasi perumahan warga. Berdasarkan fakta dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura memang terlihat masih rendah karena dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masyarakat tidak banyak terlibat aktif sehingga program tersebut tidak berjalan sesuai harapan semua pihak akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa mereka kurang berminat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dikarenakan pemerintah tidak konsisten dengan hasil keputusan rapat selama ini sebab apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait apa saja kegiatan yang berorientasi kepada pembangunan yang harus dilakukan di wilayah mereka yang tertuang dalam hasil keputusan rapat kelurahan seringkali tidak terlaksana

### **B.Keterlibatan Masyarakat Dalam Penetapan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam penetapan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dilakukan melalui adanya dorongan dari aparat pemerintah kelurahan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan mengundang masyarakat untuk selalu ikut rapat di kelurahan atau yang dilaksanakan oleh masing-masing Rukun Warga (RW)

namun kenyataannya masyarakat kurang antusias mengikuti rapat perencanaan tersebut dikarenakan rapat dilaksanakan di hari kerja sehingga banyak masyarakat yang berhalangan untuk hadir.

Selain melalui rapat aparat kelurahan juga berusaha untuk melakukan sosialisasi ke perumahan warga terkait dengan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan namun respon masyarakat juga kurang menggembirakan dimana masyarakat sudah terlalu cepat pesimis akan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah kelurahan Tebing Tinggi Okura dikarenakan selama ini program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tidak sedikitpun berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat Tebing Tinggi Okura selalu beranggapan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama program kegiatan pada PMB-RW kelurahan seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat namun kenyataannya sampai hari ini masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Tebing Okura masih di dominasi oleh masyarakat miskin. Sebagaimana di ketahui bahwa kunci dari keberhasilan pembangunan kelurahan adalah adanya peran yang aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya peran aktif atau keterlibatan masyarakat akan sulit menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **C. Kesesuaian Pembangunan Daerah Yang Akan Dilakukan Dengan Kebutuhan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab tidak sesuainya pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura adalah karena pengaruh dari keadaan alam yang dimiliki oleh kelurahan tersebut, dimana seringnya terjadi bencana banjir akibat luapan air sungai siak ke permukiman warga sampai ke akses masyarakat berupa jalan, sehingga hal ini menghalangi dilakukannya pembangunan jalan sebagai penghubung antar warga yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Faktor lain yang menyebabkan pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dikarenakan adanya ketidaksamaan antara fokus pembangunan dari masyarakat dengan pemerintah kelurahan saat ini dimana masyarakat berharap ada peningkatan taraf hidup secara ekonomi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sementara itu Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura beserta LKM Okura Bersatu lebih berfokus kepada peningkatan sarana dan prasarana masyarakat dikarenakan sebagai wilayah yang baru dimekarkan wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya terkait kelengkapan infrastruktur warga seperti akses jalan, lampu penerangan, dan fasilitas umum lainnya berupa rumah ibadah, puskesmas dan sekolah. Dari perbedaan ini berdampak kepada kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah kelurahan menjadi terganggu. Padahal tanpa adanya kerjasama yang baik yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan, maka akan sangat sulit untuk mencapai pembangunan yang maksimal dan berhasil.

#### **D. Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura, LKM RW Okura Bersatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi Okura sejauh ini belum berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan masyarakat sering sekali menolak memberikan sumbangan berupa uang kepada pihak LKM RW Okura Bersatu apabila ada program yang dilaksanakan demi kemaslahatan masyarakat itu juga, selain itu masih seringnya masyarakat tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dengan alasan sibuk bekerja padahal ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan demi terselenggaranya program PMB-RW secara baik di tengah-tengah masyarakat. Selama ini Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura telah berusaha melakukan sistim jemput bola dengan menurunkan para pegawainya dan pengurus LKM RW Okura Bersatu kerumah-rumah masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk mendapatkan ide dan gagasan yang baik demi terlaksananya pembangunan di daerah ini.

##### **1.6.2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program PMB-RW**

###### **1) Faktor Internal Yang Meliputi :**

a. Faktor Kesadaran/Kemauan Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura dalam pelaksanaan program PMB-RW yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan timbul begitu saja

akan tetapi karena adanya faktor mendorongnya untuk berpartisipasi, salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran dalam diri masyarakat ini diartikan bahwa setiap masyarakat memiliki rasa kepedulian yang berbeda-beda tergantung dari besar atau kecilnya peran pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila rasa ketergantungan masyarakat sangat tinggi akan kehadiran pemerintah dalam membantu peningkatan taraf hidupnya maka kesadaran diri/kemauan warga untuk ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah akan lebih besar namun apabila ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebijakan pemerintah rendah maka kesadaran diri/kemauan warga untuk ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah akan kecil

#### b. Faktor Pendidikan Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Pada lingkungan masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura

diketahui rata-rata tingkat pendidikan masyarakat lebih di dominasi oleh masyarakat dengan latar belakang tamatan SLTP/Sederajat yaitu 63 %, sehingga ada rasa minder dan kurang percaya diri yang dirasakan oleh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya seperti dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi.

#### c. Faktor Pendapatan Masyarakat

Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruh penghasilan/pendapatan masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk sumbangan uang/dana.

Berdasarkan penghasilan masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Disamping penghasilan/pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/ kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan.

## 2. Faktor Eksternal Yang Meliputi:

### a. Kepemimpinan Lurah Tebing Tinggi Okura

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah

satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah lurah.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai daerah yang pemekaran tahun 2013 Kelurahan Tebing Tinggi Okura termasuk kelurahan yang sering sekali berganti lurahnya dimana sampai saat ini sudah 8 orang lurah silih berganti menempati jabatan tersebut dan yang terbaru Bapak Burhan, S.Sos selaku Lurah Tebing Tinggi Okura baru saja menjabat sebagai lurah selama 7 bulan. Sering bergantinya tapuk pimpinan yang ada di kelurahan ini akan berimbas pula dengan sikap warga terhadap pemimpinnya dan hal ini bisa terlihat pada saat pihak kelurahan mengundang warga untuk ikut rapat pembahasan pembangunan di daerahnya dimana banyak warga yang tidak hadir ke kantor kelurahan dikarenakan warga tidak merasa kenal dan dekat dengan lurah yang baru sekarang sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menghadiri rapat tersebut.

#### b. Fasilitas Kantor

Dalam pelaksanaan tugas Lurah dan perangkatnya termasuk LKM RW Okura Bersatu, dibutuhkan kantor yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Lurah Tebing Tinggi Okura yang bertempat di Jalan Rasau Sakti

yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintah kelurahan merupakan sarana yang sangat penting bagi Lurah dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpi dimana seorang Lurah harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Perlengkapan kantor adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian secara keseluruhan perlengkapan di kantor Kelurahan Tebing Tinggi Okura belumlah memadai dimana sampai saat ini kantor tersebut belum memiliki ruang pertemuan/rapat sehingga jika ada pelaksanaan rapat atau kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak maka kegiatannya akan dilaksanakan di aula sekolah atau masjid yang ditentukan yang berada di sekitar wilayah Tebing Tinggi Okura selain itu ketersediaan sarana penunjang seperti komputer dan printer serta jaringan internet penunjang pekerjaan pegawai juga masih belum memadai.

Dengan keadaan yang sekarang ini hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administratif kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, peralatan/fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Lurah dan aparaturnya serta LKM Okura Bersatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan masyarakat

untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan.

### 1.7. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dapat berbentuk uang atau benda, ide dan pikiran serta dalam bentuk tenaga (gotong-royong). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura tergolong masih rendah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, serta dikarenakan kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Adapun faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura diantaranya faktor internal yang meliputi (kesadaran/kemauan, pendidikan, pendapatan/penghasilan). Dan faktor eksternal yang meliputi (Kepemimpinan Lurah Tebing Tinggi Okura dan fasilitas yang tersedia).

### 1.8. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas, ada hal-hal yang perlu penulis sarankan sebagai masukan untuk lebih

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir, antara lain:

- 1) Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura hendaknya mampu memberikan motivasi kepada masyarakatnya dengan menyadarkan mereka bahwa setiap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, karena hal tersebut akan mampu mendorong mereka lebih berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya sehingga program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.
- 2) Demi terselenggaranya fungsi pemerintahan Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan LKM RW Okura Bersatu sebagai penggerak dan motivator dalam pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang lebih baik, maka Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura hendaknya mencari alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wadah atau saluran untuk menyampaikan informasi dari setiap program pembangunan kepada masyarakat, Pemerintah Kelurahan Tebing Tinggi Okura harus aktif meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*

- Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, Wisnu. (2011). *Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: YPAPI
- Raharjo. (2011). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujianto. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Riau.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet. (2013). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press
- Suroto. (2013). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: Gajamadah University.
- Usman, Husaini. (2011). *Manajemen. Teori, Praktik, dan Riset*

*Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara